



Laporan Rencana Kerja Tahunan SPPMHKP Palangka Raya Tahun 2026

BPP
MHKP
KALIMANTAN TENGAH

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
SPPMHKP PALANGKA RAYA

KATA PENGANTAR

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SPPMHKP Palangka Raya) sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang juga memiliki kewajiban untuk mencapai sasaran pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong” maka SPPMHKP Palangka Raya menetapkan misi yaitu :

1. Pelayanan sertifikasi mutu produksi primer (CPIB, CBIB, CPIB, CPPIB, CPOB, CDOIB) dan sertifikasi mutu pasca panen (SKP, HACCP, SPDI), pengujian laboratorium dan inspeksi secara profesional berbasis penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC17025:2017, SNI ISO/IEC 17020:2012 dan SNI ISO 37001:2016 secara konsisten.
2. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang berdaya-saing melalui inspeksi, sertifikasi, surveilen, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring (penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan).
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) SPPMHKP Palangka Raya Tahun 2026, merupakan gambaran kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran strategisnya di tahun 2026. Sebagai upaya yang dilakukan oleh SPPMHKP Palangka Raya untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

Penyusunan RKT 2026 ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh SPPMHKP Palangka Raya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2026. RKT ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan SPPMHKP Palangka Raya di tahun kedepannya.

Demikian RKT SPPMHKP Palangka Raya Tahun 2026 disusun supaya dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT ini pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKT ini.



Palangka Raya, 5 Januari 2026
Kepala SPPMHKP Palangka
Raya

Aris Sugiarto, S.Pi.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	5
Pendahuluan	6
Latar Belakang.....	6
Tugas dan Peran Organisasi.....	7
Tujuan.....	8
Manfaat.....	8
Sasaran	9
Rencana Kinerja Tahunan	10
Rencana Strategis, Visi dan Misi.....	10
Arah Kebijakan	12
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	15
Penutup	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja BPPMHKP TA 2026	15
Tabel 2. Indikator Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palangka Raya Tahun 2026	17
Tabel 3. Alokasi anggaran perkegiatan pada program Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan SPPMHKP Palangkaraya tahun 2026	20

Pendahuluan

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengamanatkan bahwa Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon I.

Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kurun waktu tahun 2025–2029 dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra). Rencana Strategis BPPMHKP 2025 – 2029 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dibidang Kelautan dan Perikanan yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit pelaksana teknis yang mengampu program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan

Didalam penjabaran per tahun Rencana Aksi Kegiatan SPPMHKP Palangka Raya 2025-2029, maka dibuatlah dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 yang tetap harus menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen diatasnya (Renstra, RPJMN).

Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara dan Perpres ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu perubahan dari Permen KKP Nomor 19 Tahun 2010 terkait pengendalian mutu menjadi Permen KP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerjanya, KKP tetap mempertahankan unsur pengendalian mutu dengan membentuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis dari pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam menjaga serta menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok melalui *quality assurance*, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan keberterimaan dan daya saing kelautan dan hasil perikanan Indonesia. Dengan demikian peranan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar

area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang BPPMHKP yang mendapat mandat sebagai otoritas kompeten dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, antara lain berperan dalam pelaksanaan sertifikasi inspeksi dan *surveillance*. Dengan demikian peranan BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Oleh karena itu SPPMHKP Palangka Raya sebagai UPT BPPMHKP dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan program KKP melalui ekonomi biru. Dengan demikian peran UPT SPPMHKP Palangka Raya cukup strategis dalam rangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor dan antar area komoditi perikanan yang lancar, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan SPPMHKP Palangka Raya Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2026.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan SPPMHKP Palangka Raya pada tahun 2026.

Manfaat

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029. RKT adalah upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi

Kegiatan SPPMHKP Palangka Raya dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2026. Melalui RKT ini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan pada tahun 2026.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan SPPMHKP Palangka Raya adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan SPPMHKP Palangka Raya Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut dari RPJM SPPMHKP Palangka Raya tahun 2025 - 2029 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) BPPMHKP Tahun Anggaran 2026 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh SPPMHKP Palangka Raya pada tahun 2026.

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Strategis, Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BPPMHKP (Badan Pengendalian dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025-2029 yaitu untuk mendukung Visi Presiden dan wakil Presiden “Menyelenggarakan dan Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2025 – 2029, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, yakni :
 - a) Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat.
 - b) Inovasi dan Riset KP menguat.
2. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni :
 - a) Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal.
 - b) Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat.
 - c) Pengawasan pengelolaan SDKP.
 - d) Pengelolaan ruang laut optimal.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP, yakni :

Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, Yakni :

Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat.

Sesuai dengan Permen KP Nomor 25/permen-kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa pengembangan sistem pengendalian mutu serta pengawasan keamanan hayati ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional kebijakan tersebut diselenggarakan melalui :

- a) Pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer dan pasca panen,

- b) Pengawasan mutu domestik (pelabuhan perikanan, pasar tradisional dan pasar modern)
- c) Peningkatan kerjasama dan penyetaraan standar dengan tujuan ekspor .
- d) Peningkatan kapasitas SDM pengendalian mutu, prasarana dan sarana laboratorium penguji dan lembaga inspeksi
- e) Perumusan dan penetapan standar, regulasi teknis yang harmonis dengan persyaratan mutu (domestik, impor dan ekspor).

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Aman lingkungan). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan oleh pengawasan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPMHKP maka ditetapkanlah misi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yaitu: “Mewujudkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional yaitu Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman konsumsi dan Terpercaya”. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan Balai PPMHKP tahun 2026 adalah kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (*sovereignty*), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (*sustainability*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (*prosperity*).

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-

kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya PerPres Nomor 38 Tahun 2023 tentang Balai PPMHKP telah memperluas cakupan fungsinya dalam penyelenggaraan jaminan mutu, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini. Saat ini berdasarkan PerPres Nomor 38 Tahun 2023, tujuan penyelenggaraan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pengelolaan sistem ketertelusuran dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan inspeksi pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
6. Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh uji, penerbitan sertifikat serta surveilans pada sertifikasi mutu produksi sumberdaya kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Arah kebijakan dan strategi Balai

PPMHKP tahun 2025 – 2029 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan Balai PPMHKP dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Balai PPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan.
4. Mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai BPPMHKP – KKP.
5. Memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian laboratoris, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan

antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.

8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025- 2029, maka sasaran kegiatan dan kondisi *outcome/impact* yang ingin dicapai Balai PPMHKP Balikpapan telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, oleh karena itu Balai PPMHKP Balikpapan telah menyusun Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam Rencana Kerja 5 Tahunan (RENSTRA) tahun 2025 - 2029 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Indikator Kinerja SPPMHKP Palangka Raya TA 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KERJA KEGIATAN		TARGET 2025
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)	70

		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan pangan lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT (%)	99
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (Nilai)	75
		5	Nilai kualitar penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (Nilai)	92
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (Nilai)	71,2
		8	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)	100
		9	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (Nilai)	87
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (Indeks)	86
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk	85

			Perbaikan Kinerja lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)	
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)	76
		13	Perentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Palangka Raya (%)	70
		14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (Nilai)	88

Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SPPMHKP Palangka Raya Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2. Indikator Kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KERJA KEGIATAN		TARGET 2026
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Palangka Raya (%)	72
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Palangka Raya (%)	72

SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palangka Raya (%)	71
SK.3	Tatakelola Pemerintahan yang	4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Palangka Raya (Indeks)	82,5
	efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Palangka Raya	5	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palangka Raya (Nilai)	77
		6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palangka Raya (Nilai)	86,5
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palangka Raya (Persen)	86
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palangka Raya (Nilai)	92,1
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palangka Raya (Nilai)	71,75
		10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palangka Raya (%)	77
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Palangka Raya (Indeks)	3,5

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat dan UPT. Adapun kegiatan dalam program pengembangan, pengendalian mutu

hasil perikanan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pengembangan dan pembinaan pengawasan mutu perikanan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan mutu perikanan sesuai standar dan perkembangan iptek. Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemafaatan sumberdaya perikanan yang diikuti meningkatnya lalu

lintas hasil perikanan baik ekspor maupun domestik. Jaminan mutu ikan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan serta mendukung upaya perlindungan dari hulu ke hilir.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya malachite green pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

Rencana Kerja BPPMHKP tahun 2026 diarahkan untuk mencapai target- target kinerja pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Balai PPMHKP Balikpapan tahun anggaran 2025 sebesar **Rp. 6.059.238.000,-**. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai PPMHKP Balikpapan untuk

mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan refocusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Stasiun PPMHKP Palangka Raya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Stasiun PPMHKP Palangka Raya Tahun 2026

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	231.750.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	86.000.000
3.	Dukuman Manajemen internal Lingkup Badan Pengendalian dan Penagawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	5.741.488.000
Total Anggaran SPPMHKP Palangka Raya Tahun 2025		6.059.238.000

Penutup

Rencana kerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan pada T.A 2026 ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan SPPMHKP Palangka Raya antara lain :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.
3. Dukuman Manajemen internal Lingkup Badan Pengendalian dan Penagawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan.

Total rencana alokasi anggaran per kegiatan Stasiun PPMHKP Palangka Raya pada tahun 2026 sebesar **Rp. 6.059.238.000,-**. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Hasil kelautan dan Perikanan Sebesar **Rp. 5.741.488.000,-**
2. Manajemen Mutu sebesar **Rp. 86.000.000,-**
3. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp. 231.750.000,-**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN BALIKPAPAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Eko Sulystianto**

Jabatan : Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**

Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Balikpapan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Eko Sulystianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN BALIKPAPAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)	72
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Balikpapan	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Indeks)	82,5
		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)	77
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)	86,2
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Persen)	86
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)	92,1
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Nilai)	71,75
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (%)	77
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan (Indeks)	3.5

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	231.750.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	86.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	5.741.488.000
Total Anggaran Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026		6.059.238.000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Balikpapan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Eko Sulystianto

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 6,059,238,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
032.13.EC 3989 3989.PDC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sertifikasi Produk[Base Line]	35.0 produk		317,750,000 231,750,000 131,000,000	
3989.PDC.002	Lokasi : KOTA BALIKPAPAN Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	35.0 produk		131,000,000	
051	Validasi produk pada sektor produksi pasca panen			131,000,000	U
A	Presentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) yang diterbitkan			20,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.047-Balikpapan)			3,430,000	PNP
	- Makan Rapat Biasa	40.0 OK	48,000	1,920,000	SBM
	- Snack Rapat Biasa	40.0 OK	27,000	1,080,000	SBM
	- Perlengkapan Koordinasi	1.0 PKT	430,000	430,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.047-Balikpapan)			15,550,000	PNP
	> Inspeksi Pelaku Usaha yang Menerapkan Distribusi Ikan yang Baik			10,160,000	
	- Transport [2 UNIT x 2 KALI]	4.0 OK	975,000	3,900,000	
	- Penginapan	2.0 OH	550,000	1,100,000	
	- Uang Harian	12.0 OH	430,000	5,160,000	SBM
	> Forum Konsultasi Publik SPDI			5,390,000	
	- Transport	1.0 OK	2,600,000	2,600,000	SBM
	- Biaya Penginapan [1 ORG x 2 HARI]	2.0 OH	765,000	1,530,000	SBM
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI]	3.0 OH	420,000	1,260,000	SBM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.047-Balikpapan)			1,020,000	PNP
	> Inspeksi Pelaku Usaha yang Menerapkan Distribusi Ikan yang Baik			1,020,000	
	- Uang Harian Inspeksi / Verifikasi Balikpapan [2 ORG x 3 UNIT x 1 KALI x 1 HARI]	6.0 OH	170,000	1,020,000	SBM
B	Presentase Sertifikat Kelayakan Pengelohan (SKP) diterbitkan pada UPI skala UMKM dan Menengah Besar			32,500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.047-Balikpapan)			27,740,000	PNP
	> Inspeksi Pelaku Usaha yang Menerapkan Kelayakan Dasar			19,020,000	
	- Penginapan Inspeksi/Verifikasi [2 HARI x 3 KALI]	6.0 OH	550,000	3,300,000	
	- Uang Harian Inspeksi/Verifikasi	24.0 OH	430,000	10,320,000	
	- Transport [6 UNIT x 1 KALI]	6.0 OK	900,000	5,400,000	
	> Inspeksi Pelaku Usaha yang Menerapkan Kelayakan Dasar (Berau)			8,720,000	
	- Penginapan Inspeksi/Verifikasi Berau [2 ORG x 1 KALI]	2.0 OH	650,000	1,300,000	
	- Transport Inspeksi/Verifikasi Berau [2 ORG x 1 UNIT x 1 KALI]	2.0 OK	2,420,000	4,840,000	
	- Uang Harian Inspeksi / Verifikasi [2 ORG x 1 UNIT x 1 KALI x 3 HARI]	6.0 OH	430,000	2,580,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 6,059,238,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Uang Harian Inspeksi/Verifikasi Balikpapan [2 ORG x 7 UNIT x 2 KALI x 1 HARI] <i>Jumlah Sertifikat HACCP Ruang Lingkup Produk pada UPI</i>	28.0 OH	170,000	4,760,000 4,760,000 28,500,000	PNP
C					
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.047-Balikpapan) > Inspeksi Pelaku Usaha yang Menerapkan HACCP (Samarinda) - Transport Inspeksi HACCP Samarinda [1 UPI x 1 KALI] - Uang Harian Inspeksi HACCP Samarinda [2 ORG x 1 UPI x 1 HARI] > Inspeksi Pelaku Usaha yang Menerapkan HACCP (Bontang) - Transport Inspeksi HACCP Bontang [1 ORG x 1 KALI] - Uang Harian Inspeksi HACCP Bontang [2 ORG x 1 UPI x 2 HARI] - Biaya Penginapan [1 UPI x 1 HARI x 1 KALI] > Inspeksi Pelaku Usaha yang Menerapkan HACCP (Berau) - Transport Inspeksi HACCP Berau [2 ORG x 1 KALI] - Uang Harian Inspeksi HACCP Berau [2 ORG x 4 HARI] - Biaya Penginapan Inspeksi HACCP Berau [1 ORG x 3 HARI x 1 KALI] > Surveilans Pelaku Usaha yang Menerapkan HACCP (Samarinda) - Transport Surveilans HACCP Samarinda [1 UPI x 1 KALI] - Uang Harian Surveilans HACCP Samarinda [2 ORG x 1 UPI x 1 HARI] > Surveilans Pelaku Usaha yang Menerapkan HACCP (Kutai Kartanegara) - Transport Surveilans HACCP Kutai Kartanegara [2 UPI x 1 KALI] - Uang Harian Surveilans HACCP Kutai Kartanegara [2 ORG x 2 UPI x 1 HARI] > Pelatihan Noreg HACCP - Transport - Biaya Penginapan [1 ORG x 4 HARI] - Uang Harian [1 ORG x 5 HARI]	1.0 OK 2.0 OH 1.0 OK 4.0 OH 1.0 OH 2.0 OK 8.0 OH 3.0 OH 1.0 OK 2.0 OH 2.0 OK 4.0 OH 1.0 OK	270,000 430,000 265,000 430,000 550,000 2,200,000 430,000 650,000 265,000 430,000 190,000 430,000 2,700,000	1,130,000 270,000 860,000 2,535,000 265,000 1,720,000 550,000 9,790,000 4,400,000 3,440,000 1,950,000 1,125,000 265,000 860,000 2,100,000 380,000 1,720,000 7,400,000 2,700,000	RM SBM SBM SBM RM SBM SBM RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Surveilans Pelaku Usaha yang Menerapkan HACCP Balikpapan - Inspeksi Pelaku Usaha yang Menerapkan HACCP Balikpapan <i>Bahan Laboratorium</i> <u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Bahan Laboratorium	5.0 OH 4.0 OH 22.0 OH	480,000 575,000 170,000 170,000	2,400,000 2,300,000 680,000 3,740,000 50,000,000	SBM SBM RM PNP
D					
521811		1.0 PKT	50,000,000	50,000,000	PNP

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 6,059,238,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3989.PDF	Sertifikasi Lembaga[Base Line]	31.0 Lembaga, Badan Usaha		88,750,000	
3989.PDF.002	Lokasi : KOTA BALIKPAPAN	31.0 Lembaga		88,750,000	
051	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi			88,750,000	U
A	Validasi Sertifikasi Produksi Primer			58,000,000	
521211	Sertifikasi CBIB pada Pembudidayaan Ikan			600,000	RM
	Belanja Bahan			600,000	
	(KPPN.047-Balikpapan)				
	> Koordinasi Sertifikasi Produksi Primer ke Pelaku Usaha			600,000	
	- Snack Rapat Biasa	25.0 OK	24,000	600,000	SBM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			55,360,000	RM
	(KPPN.047-Balikpapan)				
	> Inspeksi Pembudidaya Ikan yang Menerapkan CBIB (Kutai Kartanegara)			15,240,000	
	- Uang Harian CBIB Kutai Kartanegara [3 ORG x 2 KALI x 3 HARI]	18.0 OH	430,000	7,740,000	
	- Transport CBIB Kutai Kartanegara [3 KALI]	3.0 OK	1,400,000	4,200,000	
	- Penginapan CPIB Kutai Kartanegara [3 KALI x 2 HARI]	6.0 OH	550,000	3,300,000	
	> Inspeksi Pembudidaya Ikan yang Menerapkan CBIB (Samarinda)			4,880,000	
	- Uang Harian CBIB Samarinda [2 ORG x 1 KALI x 3 HARI]	6.0 OH	430,000	2,580,000	
	- Transport CBIB Samarinda [1 KALI]	1.0 OK	1,000,000	1,000,000	
	- Penginapan CPIB Samarinda [1 KALI x 2 HARI]	2.0 OH	650,000	1,300,000	
	> Inspeksi / Surveil Pembudidaya Ikan yang Menerapkan CBIB (Grogot)			14,860,000	
	- Uang Harian CBIB Grogot [2 ORG x 2 KALI x 4 HARI]	16.0 OH	430,000	6,880,000	SBM
	- Penginapan CBIB Grogot [3 HARI x 2 KALI]	6.0 OH	500,000	3,000,000	SBM
	- Transport CBIB Grogot	2.0 OK	2,490,000	4,980,000	
	> Inspeksi / Surveil Pembudidaya Ikan yang Menerapkan CBIB (Berau)			20,380,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas CBIB Berau [2 ORG x 2 KALI x 4 HARI]	16.0 OH	430,000	6,880,000	SBM
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Berau [2 ORG x 2 KALI]	4.0 OK	2,400,000	9,600,000	SBM
	- Biaya Penginapan CBIB Berau [3 HARI x 2 KALI]	6.0 OH	650,000	3,900,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2,040,000	RM
	(KPPN.047-Balikpapan)				
	- Inspeksi Pembudidaya Ikan yang Menerapkan CBIB Balikpapan [3 ORG x 4 UNIT x 1 KALI]			2,040,000	SBM
B	Sertifikasi CPIB Pada Pembenihan	12.0 OH	170,000	2,040,000	
				7,950,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 6,059,238,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.047-Balikpapan) > Inspeksi Pembenihan Ikan yang Menerapkan CPIB Samarinda - Uang Harian CPIB Samarinda [2 ORG x 1 KALI x 2 HARI] 4.0 OH 430,000 1,720,000 - Transport CPIB Samarinda [1 KALI] 1.0 OK 1,000,000 1,000,000 - Penginapan CPIB Kutai Kartanegara [1 KALI x 1 HARI] 1.0 OH 630,000 630,000 > Inspeksi Pembenihan Ikan yang Menerapkan CPIB Kutai Kartanegara - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Timur) [2 ORG x 1 KALI x 2 HARI] 4.0 OH 430,000 1,720,000 - Satuan Biaya Transportasi Darat 1.0 OK 1,600,000 1,600,000 - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas [1 KALI x 1 HARI] 1.0 OH 600,000 600,000			7,270,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Inspeksi Pembenihan Ikan yang Menerapkan CPIB Balikpapan [2 ORG x 2 UNIT x 1 KALI] 4.0 OH 170,000 680,000 <i>Sertifikasi CPPIB pada Usaha Produksi Pakan Ikan</i>			680,000	SBM
C	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			5,650,000	
524111	(KPPN.047-Balikpapan) > Inspeksi Usaha Produksi Pakan Ikan yang Menerapkan CPPIB - Uang Harian CPPIB [2 ORG x 1 KALI x 3 HARI] 5,650,000 - Transport CPPIB [1 KALI] 6.0 OH 430,000 2,580,000 - Penginapan CPPIB [2 HARI x 1 KALI] 1.0 OK 1,770,000 1,770,000 <i>Sertifikasi CPIB pada Unit Usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan</i> 2.0 OH 650,000 1,300,000			5,650,000	RM
D	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			17,150,000	
524111	(KPPN.047-Balikpapan) > Inspeksi Usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang Menerapkan CPIB (Berau) - Uang Harian CPIB Berau [2 ORG x 1 KALI x 3 HARI] 10,180,000 - Penginapan CPIB Berau [2 ORG x 2 HARI x 1 KALI] 6.0 OH 430,000 2,580,000 - Transport Berau [2 ORG x 1 KALI] 4.0 OH 650,000 2,600,000 > Inspeksi Usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang Menerapkan CPIB - Uang Harian CPIB [2 ORG x 1 KALI x 3 HARI] 5,440,000 - Penginapan CPIB [2 HARI x 1 KALI] 6.0 OH 430,000 2,580,000 - Transport CPIB [1 KALI] 2.0 OH 650,000 1,300,000			15,620,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Inspeksi Usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang Menerapkan CPIB [3 ORG x 3 UNIT x 1 KALI] 1.0 OK 1,560,000 1,560,000			1,530,000	RM
	<i>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]</i> 9.0 OH 170,000 1,530,000				SBM
3989.QIC		17.0 Lembaga		12,000,000	
3989.QIC.002	Lokasi : KOTA BALIKPAPAN UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	10.0 Lembaga		5,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(032)
(13)
(567610)
Rp. 6,059,238,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
051	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			5,000,000	U
A	Evaluasi Penerbitan SMKHP pada Unit Pengolah Ikan			5,000,000	
521211	Belanja Bahan			5,000,000	PNP
	(KPPN.047-Balikpapan)				
	> Evaluasi Penerbitan SMKHP pada Unit Pengolah Ikan			5,000,000	
	- Spanduk	2.0 PKT	487,500	975,000	
	- Perlengkapan	2.0 PKT	700,000	1,400,000	
	- Makan Rapat Biasa KALIMANTAN TIMUR [35 ORG x 2 KAL]	70.0 OK	37,500	2,625,000	SBM
3989.QIC.003	unit produksi primer yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	7.0 Lembaga		7,000,000	
051	unit produksi primer yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan			7,000,000	U
A	Jumlah Unit Produksi Primer yang Konsisten Menerapkan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			7,000,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			5,650,000	PNP
	(KPPN.047-Balikpapan)				
	- Bahan Uji Mutu	1.0 PKT	5,650,000	5,650,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			1,350,000	PNP
	(KPPN.047-Balikpapan)				
	> Sub Kontrak Pengujian ke Laboratorium Eksternal			1,350,000	
	- Uji Logam Berat	1.0 PKT	1,350,000	1,350,000	
7010	Manajemen Mutu			86,000,000	
7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan		45,500,000	
	Lokasi : KOTA BALIKPAPAN				
7010.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	1.0 Rekomendasi Kebijakan		45,500,000	
051	Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji			45,500,000	U
A	Pelaksanaan SJMHKP Dalam Rangka Quality Assurance Produk Hasil Perikanan			45,500,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			24,000,000	PNP
	(KPPN.047-Balikpapan)				
	- Biaya Petanggunggutan ISO 17020	1.0 PKT	3,500,000	3,500,000	
	- Iuran Tahunan ISO 17020	1.0 PKT	1,500,000	1,500,000	
	- Blaya Surveilien KAN ISO 17020 [2 ORG x 2 HARI]	4.0 OH	3,500,000	14,000,000	
	- Pendaftaran 17020	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 6,059,238,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.047-Balikpapan) > Perjalanan Asesor - Penginapan [2 ORG x 2 HARI] - Transport - Uang Harian [2 ORG x 3 HARI] - Transportasi Lokal [2 ORG x 1 KALI] > Pelatihan 17020 - Penginapan - Transport - Uang Harian [1 ORG x 2 HARI]	4.0 OH 2.0 OK 6.0 OH 2.0 OK 1.0 OH 1.0 OK 2.0 OH	850,000 3,870,000 430,000 1,000,000 850,000 3,870,000 530,000	21,500,000 15,720,000 3,400,000 7,740,000 2,580,000 2,000,000 5,780,000 850,000 3,870,000 1,060,000	PNP
7010.PDD	<u>Standarisasi Lembaga[Base Line]</u>	1.0 Lembaga		40,500,000	
7010.PDD.002	Lokasi : KOTA BALIKPAPAN Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	1.0 Lembaga		40,500,000	
051	Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi			40,500,000	U
A	<i>Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Mutu</i>			40,500,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Uji Profisiensi - Uji Banding - Pemeliharaan Panelis > Reakreditasi 17025 - Pelaksanaan Assessment ISO 17025 [2 ORG x 2 HARI] - Biaya Pendaftaran - Iuran Tahunan 17025	2.0 PKT 2.0 PKT 1.0 PKT 4.0 OH 1.0 PKT 1.0 PKT	1,500,000 400,000 1,000,000 3,500,000 5,000,000 1,500,000	25,300,000 3,000,000 800,000 1,000,000 20,500,000 14,000,000 5,000,000 1,500,000	PNP
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.047-Balikpapan) > Perjalanan Asesor - Penginapan [2 ORG x 2 HARI] - Transport Pesawat - Transport Lokal [2 ORG x 1 KALI] - Uang Harian [2 ORG x 3 HARI]	 4.0 OH 2.0 OK 2.0 OK 6.0 OH	 800,000 3,800,000 910,000 430,000	15,200,000 15,200,000 3,200,000 7,600,000 1,820,000 2,580,000	PNP
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen			5,741,488,000	
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan			5,741,488,000	
3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		5,741,488,000	
3987.EBA.962	Lokasi : KOTA BALIKPAPAN Layanan Umum	1.0 Layanan		198,850,000	
051	Layanan Umum dan Rumah Tangga			198,850,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 6,059,238,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Layanan Umum dan RT			81,605,000	
	521211 <u>Belanja Bahan</u> (KPPN.047-Balikpapan)			2,105,000	RM
	> Kearsipan			2,105,000	
	- Makan Rapat Pemusnahan Arsip [15 ORG x 1 KALI]	15.0 OK	28,000	420,000	
	- Snack Rapat Pemusnahan Arsip [15 ORG x 1 KALI]	15.0 OK	20,000	300,000	
	- Perlengkapan Kearsipan	1.0 PKT	1,385,000	1,385,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.047-Balikpapan)			6,000,000	RM
	- Honor Instruktur Olahraga/Penceramah [1 ORG x 1 KALI x 12 BLN]	12.0 OJ	500,000	6,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.047-Balikpapan)			73,500,000	RM
	> Perjalanan Dinas Arsiparis			5,990,000	
	- Transport	1.0 OK	3,000,000	3,000,000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI]	2.0 OH	700,000	1,400,000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI]	3.0 OH	530,000	1,590,000	SBM
	> Penyusunan RKBMN			14,440,000	
	- Transport [2 ORG x 1 KALI]	2.0 OK	3,000,000	6,000,000	
	- Penginapan [2 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	6.0 OH	700,000	4,200,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 4 HARI x 1 KALI]	8.0 OH	530,000	4,240,000	
	> Perjalanan Dinas Non Teknis			45,850,000	
	- Transport [1 ORG x 7 KALI]	7.0 OK	3,460,000	24,220,000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 7 KALI]	14.0 OH	750,000	10,500,000	
	- Uang Harian [3 HARI x 7 KALI]	21.0 OH	530,000	11,130,000	
	> Konsultasi / Koordinasi ke Kanwil			7,220,000	
	- Transport	4.0 OK	945,000	3,780,000	
	- Uang Harian	8.0 OH	430,000	3,440,000	
B	<i>Koordinasi dengan Instansi Terkait</i>			52,620,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.047-Balikpapan)			52,620,000	RM
	> Perjalanan Dinas ke Propinsi			15,060,000	
	- Transport [10 KALI]	10.0 OK	689,000	6,890,000	
	- Uang Harian	19.0 OH	430,000	8,170,000	
	> Perjalanan Konsultasi / Koordinasi ke Pusat			37,560,000	
	- Transport [1 ORG x 6 KALI]	6.0 OK	3,500,000	21,000,000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 6 KALI]	12.0 OH	850,000	10,200,000	
	- Uang Harian [2 HARI x 6 KALI]	12.0 OH	530,000	6,360,000	
C	<i>Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran</i>			59,655,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 6,059,238,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.047-Balikpapan)			59,655,000	RM
	> Perjalanan Rekon Keuangan SAI dan BMN			25,560,000	
	- Transport [2 ORG x 2 KALI]	4.0 OK	3,400,000	13,600,000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	8.0 OH	700,000	5,600,000	
	- Uang Harian Rekon Keuangan [2 ORG x 3 HARI x 2 KALI]	12.0 OH	530,000	6,360,000	SBM
	> Penyusunan / Finalisasi RKAKL			19,970,000	
	- Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 1 KALI]	9.0 OH	530,000	4,770,000	
	- Penginapan Eselon III [1 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	2.0 OH	850,000	1,700,000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 1 KALI]	4.0 OH	750,000	3,000,000	
	- Transport [3 ORG x 1 KALI]	3.0 OH	3,500,000	10,500,000	
	> Perjalanan Dialog Kerja			14,125,000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 2 KALI]	6.0 OH	530,000	3,180,000	
	- Transport [1 ORG x 2 KALI]	2.0 OH	3,772,500	7,545,000	
	- Biaya Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 2 KALI]	4.0 OH	850,000	3,400,000	
D	<u>Maintenance WBK/Pelayanan Publik</u>			4,970,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.047-Balikpapan)			4,970,000	RM
	- Bahan Pendukung Pelayanan Publik/PPID	1.0 PKT	4,010,000	4,010,000	
	> Maintenance WBK			960,000	
	- Snack Rapat Biasa [20 ORG x 1 KALI]	20.0 OK	20,000	400,000	
	- Makan Rapat Biasa [20 ORG x 1 KALI]	20.0 OK	28,000	560,000	
3987.EBA.994	<u>Layanan Perkantoran</u>	1.0 Layanan		5,542,638,000	
001	<u>Gaji dan Tunjangan</u>			4,370,002,000	U
A	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS</u>			2,933,706,000	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.047-Balikpapan)			979,532,000	RM
	- Gaji Pokok PNS	1.0 THN	839,000,000	839,000,000	
	- Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13)	1.0 BLN	67,632,000	67,632,000	
	- Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14)	1.0 BLN	72,900,000	72,900,000	
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.047-Balikpapan)			14,000	RM
	- Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	12,000	12,000	
	- Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)	1.0 BLN	1,000	1,000	
	- Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	1.0 BLN	1,000	1,000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.047-Balikpapan)			73,000,000	RM
	- Tunjangan Suami / Istri PNS	1.0 THN	62,000,000	62,000,000	
	- Tunjangan Suami / Istri PNS (Gaji ke 13)	1.0 BLN	5,000,000	5,000,000	
	- Tunjangan Suami / Istri PNS (Gaji ke 14)	1.0 BLN	6,000,000	6,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 6,059,238,000

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Tunjangan Anak PNS - Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 13) - Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	21,000,000 1,700,000 1,900,000	24,600,000 21,000,000 1,700,000 1,900,000	RM
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Tunjangan Struktural PNS - Tunjangan Struktural PNS (Gaji ke 13) - Tunjangan Struktural PNS (Gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	23,760,000 1,800,000 2,340,000	27,900,000 23,760,000 1,800,000 2,340,000	RM
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Tunjangan Fungsional PNS - Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 13) - Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	44,000,000 3,580,000 3,580,000	51,160,000 44,000,000 3,580,000 3,580,000	RM
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Tunjangan PPh PNS - Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 13) - Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	2,000,000 5,000,000 5,000,000	12,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000	RM
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Tunjangan Beras PNS - Tunjangan Beras PNS (Gaji ke 13) - Tunjangan Beras PNS (Gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	44,000,000 4,000,000 3,600,000	51,600,000 44,000,000 4,000,000 3,600,000	RM
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	170,000,000	170,000,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Tunjangan Umum PNS - Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) - Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	20,000,000 1,700,000 1,700,000	23,400,000 20,000,000 1,700,000 1,700,000	RM
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Uang Lembur Pegawai	1.0 THN	190,000,000	190,000,000	RM
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja	1.0 THN	1,330,500,000	1,330,500,000	RM
B	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK</i>			1,436,296,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 6,059,238,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Gaji Pokok PPPK - Gaji Pokok PPPK (Gaji ke 13) - Gaji Pokok PPPK (Gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	539,200,000 31,100,000 31,100,000	601,400,000 539,200,000 31,100,000 31,100,000	RM
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Pembulatan Gaji Pokok	1.0 THN	16,000	16,000	RM
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Tunjangan Suami/Istri PPPK - Tunjangan Suami/Istri PPPK (Gaji ke 13) - Tunjangan Suami/Istri PPPK (Gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	37,320,000 3,200,000 3,200,000	43,720,000 37,320,000 3,200,000 3,200,000	RM
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Tunjangan Anak PPPK - Tunjangan Anak PPPK (Gaji ke 13) - Tunjangan Anak PPPK (Gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	7,464,000 622,000 622,000	8,708,000 7,464,000 622,000 622,000	RM
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Tunjangan Beras PPPK - Tunjangan Beras PPPK (Gaji ke 13) - Tunjangan Beras PPPK (Gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	27,816,000 2,318,000 2,318,000	32,452,000 27,816,000 2,318,000 2,318,000	RM
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Uang Makan PPPK	1.0 THN	104,000,000	104,000,000	RM
511633	<u>Belanja Tunjangan Umum PPPK</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Tunjangan Umum PPPK - Tunjangan Umum PPPK (Gaji ke 13) - Tunjangan Umum PPPK (Gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 THN	24,000,000 2,000,000 2,000,000	28,000,000 24,000,000 2,000,000 2,000,000	RM
512212	<u>Belanja Uang Lembur PPPK</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Uang Lembur PPPK	1.0 THN	70,000,000	70,000,000	RM
512414	<u>Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.0 THN	548,000,000	548,000,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,172,636,000	U
A	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>247,800,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 6,059,238,000

Halaman : 11

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.047-Balikpapan)			54,000,000	RM
	- Langganan Jasa Internet	12.0 BLN	4,500,000	54,000,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.047-Balikpapan)			180,000,000	RM
	- Pembayaran Listrik	12.0 BLN	15,000,000	180,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.047-Balikpapan)			1,800,000	RM
	- Pembayaran Telepon	12.0 BLN	150,000	1,800,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.047-Balikpapan)			12,000,000	RM
	- Pembayaran Air	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000	
B	<i>Perawatan Kendaraan Bermotor</i>			289,980,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.047-Balikpapan)			12,500,000	RM
	- Pengurusan STNK/Pajak Mobil Dinas	6.0 UNIT	1,500,000	9,000,000	
	- Pengurusan STNK/Pajak Motor Dinas	10.0 UNIT	350,000	3,500,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.047-Balikpapan)			277,480,000	2 RM
	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan				*
	- Operasional Lapangan (Double Gardan) (Kalimantan Timur)	1.0 UNIT	39,480,000	39,480,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Kalimantan Timur)	5.0 UNIT	37,360,000	186,800,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Kalimantan Timur)	10.0 UNIT	5,120,000	51,200,000	
C	<i>Perawatan Gedung</i>			77,060,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.047-Balikpapan)			77,060,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor Induk dan Pelayanan				
	- Pemeliharaan Internet/Server	230.0 m2	242,000	55,660,000	
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor Induk	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	
	- Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.0 m2	10,000	2,000,000	
		72.0 M2	200,000	14,400,000	
D	<i>Operasional Perkantoran</i>			229,320,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.047-Balikpapan)			60,000,000	RM
	- Belanja Keperluan Rumah Tangga Perkantoran	12.0 BLN	5,000,000	60,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.047-Balikpapan)			2,400,000	RM
	- Biaya Pengiriman Surat / Paket Dinas	12.0 BLN	200,000	2,400,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB

(032)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORG

(13)

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

UNIT KERJA

(567610)

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

ALOKASI

Rp. 6,059,238,000

Halaman : 12

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.047-Balikpapan)			82,920,000	RM
	> Honor Pengelola Anggaran			56,520,000	
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,180,000	14,160,000	SBM
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,150,000	13,800,000	SBM
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	470,000	5,640,000	SBM
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	410,000	4,920,000	SBM
	- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar) [2 ORG x 12 BLN]				
	- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar) [3 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	300,000	7,200,000	SBM
	> Honor Pengelola PNBp	36.0 OB	300,000	10,800,000	SBM
	- Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana s.d. Rp.100 juta) [1 ORG x 12 BLN]			5,520,000	
	- Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana s.d. Rp1 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	260,000	3,120,000	SBM
	> Honor Pengelola SAI (SAKPA dan BMN)				
	- Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	200,000	2,400,000	SBM
	- Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN]			20,880,000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	200,000	2,400,000	SBM
	- Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	200,000	2,400,000	SBM
	- Honorarium Pengurus/Penvimban Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang [2 ORG x 12 BLN]				
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	150,000	1,800,000	SBM
	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>	12.0 OB	150,000	1,800,000	SBM
	(KPPN.047-Balikpapan)				
	- Keperluan Sehari-hari Perkantoran Kurang 40 Pegawai (Kalimantan Timur)	24.0 OB	180,000	4,320,000	SBM
	<u>Belanja Sewa</u>	12.0 OB	680,000	8,160,000	SBM
521811	(KPPN.047-Balikpapan)			35,000,000	RM
	- Sewa Tempat Penyimpanan Arsip				
	<u>Outsourcing</u>	1.0 OT	35,000,000	35,000,000	
522141	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>			49,000,000	RM
	(KPPN.047-Balikpapan)				
	- Tenaga Outsourcing	1.0 THN	49,000,000	49,000,000	
E	<u>Pengadaan Pakaian Dinas</u>			72,800,000	
522191	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>			72,800,000	RM
	(KPPN.047-Balikpapan)				
	- Pakaian Dinas Pegawai [32 STELL x 1 KALI]	1.0 THN	72,800,000	72,800,000	
F	<u>Pengadaan Daya Tahan Tubuh</u>			31,296,000	
521119				31,296,000	RM
		32.0 STEL	978,000	31,296,000	SBM
G				57,456,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ALOKASI Rp. 6,059,238,000

Halaman : 13

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Penambah Daya Tahan Tubuh [12 ORG x 21 HARI x 12 BLN] <i>H</i> <u>Pas Pelabuhan Laut / Bandara</u>	3024.0 OH	19,000	57,456,000 57,456,000 4,000,000	RM
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Pembuatan PAS Bandara Kendaraan Roda 4 - Pembuatan PAS Orang <i>I</i> <u>Pertemuan / Delegasi / Tamu</u>	5.0 UNIT 10.0 PEG	300,000 250,000	1,500,000 2,500,000 68,000,000	RM
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Jamuan Makan <i>J</i> <u>Perawatan Sarana Gedung</u>	1.0 THN	68,000,000	68,000,000 94,924,000	RM
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Perpanjangan Lisensi Aplikasi	1.0 THN	8,264,000	8,264,000	RM
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Perawatan / Kalibrasi Alat Laboratorium	1.0 PKT	35,000,000	35,000,000	RM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.047-Balikpapan) - Komputer / Laptop - Printer - AC - Barang Inventaris Kantor - Genset 25 KVA	27.0 UNIT 19.0 UNIT 33.0 UNIT 32.0 PEG 1.0 UNIT	730,000 300,000 500,000 80,000 7,190,000	19,710,000 5,700,000 16,500,000 2,560,000 7,190,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Balikpapan, 12 Desember 2025

Kepala

Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si
NIP 197002111997031003